

MANAJEMEN BIAYA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Irwan Suryadi

STIT Misbahul Ulum Gumawang, Jl. Irigasi Desa Tanah Merah Kec. Belitang
Madang Raya Kabupaten OKU Timur Prov. Sumatera-Selatan
Email : torangga@gmail.com

ABSTRAK

Aspek pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi merupakan komponen utama guna terlaksananya pendidikan sesuai yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang secara signifikan mencakup secara keseluruhan dari seluruh komponen biaya. Aspek pembiayaan dalam dunia pendidikan difahami sebagai human investment atau investasi bagi manusia untuk mendapatkan kemampuan dan keterampilan baru guna mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Kata Kunci : Pembiayaan, Pendidikan dan Human Investment

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara(UU Sisdiknas, 2003 pasal 1 ayat 1).

Aspek pembiayaan pendidikan merupakan komponen utama terlaksananya keberlangsungan pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi. Sebagai *instrument input* (Instrumen masukan), pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyelenggaraan pendidikan, dengan tanpa adanya dukungan pembiayaan yang memadai, proses pendidikan tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan

(Mulyono, 2010, hal.23).

Fakry Gaffar memaknai pembiayaan pendidikan merupakan *Money Spent* (Dana yang dibelanjakan) untuk barang atau jasa yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan pendidikan (Fakry Gaffar ; 2016). Lebih lanjut Fakry Gaffar mengatakan bahwa pembiayaan merupakan *facilitating element* (elemen fasilitas) untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai *Human Investment in Human Capital*.

Pada awalnya pendidikan masih jarang mendapatkan perhatian dari para ekonom, hal ini dikarenakan ; a) peranan pendidikan dalam ekonomi nasional dinilai relatif kecil, b) adanya pola pikir yang memandang kemakmuran merupakan sesuatu yang bersifat material dan fisik, dan c) hasil dari riset ekonomi diperoleh bahwa pendidikan merupakan sektor yang paling banyak mengeluarkan biaya pajak yang cukup besar dari pemerintah. (Jones, 1985).

Memahami besarnya biaya pajak yang dikeluarkan pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan, para ahli ekonomi mulai tertarik pada pendidikan dan mempertanyakan seberapa besar pengaruh pendidikan pada ekonomi atau sebaliknya. Perhatian itu diantaranya mulai ditunjukkan oleh Adam Smith seorang ahli ekonomi yang berpendapat bahwa kita merasa berhutang budi pada pendidikan, karena pendidikan membuat kita menjadi unggul dan *intelligent*, pemikiran yang panjang dan memiliki kebiasaan yang baik. Namun, masih banyak perdebatan yang terjadi mengenai pendapat Adam Smith ini, salah satunya ialah orang merasa bahwa pengaruh pendidikan pada ekonomi datangnya kemudian, tidak langsung pada saat itu bisa dirasakan (Vaizey, 1962:19).

Satu hal yang penting terhadap pemikiran baru bahwa pendidikan dianggap sebagai salah satu bentuk investasi (*Human Investment*). Dimana konsep ini menyatakan bahwa orang yang memiliki keterampilan tertentu, kebiasaan dan pengetahuan dapat mereka jual dalam bentuk pekerjaan untuk memperoleh upah atau gaji, sehingga dapat diperankan sebagai sumber selama hidup mereka (Jones, 1985). Lebih jauh "*human capital*" ini dapat

dianalogikan sebagai modal fisik karena kedua-duanya digunakan untuk menghasilkan pendapatan tetap bertahun-tahun lamanya.

Pembiayaan dilihat dari kacamata konsumen dapat dipandang sebagai konsumsi jika *benefit*-nya dapat dinikmati langsung pada saat dikonsumsi, dan dalam kasus pendidikan pembiayaan dilihat dari sudut pandang siswa didik merupakan investasi jangka panjang yang *benefit*-nya dapat dirasakan setelah beberapa waktu kemudian. Sementara itu pada tataran perguruan tinggi diperlukan pembiayaan yang digunakan untuk menyediakan gedung dan fasilitas lainnya, guna menghasilkan sumber daya yang memiliki kompetensi sesuai dengan karakter dan kompetensi diri. Karena dalam penyelenggaraan pendidikannya tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya sehingga lembaga pendidikan harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya ini, sehingga biaya yang dimiliki berdasarkan penerimaan dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya.

Nanang Fatah (2004, hal.24) mengemukakan bahwa pembiayaan pendidikan atau belanja sekolah ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi diantara sekolah satu dan daerah yang lain. Pengeluaran sekolah dapat dikategorikan kedalam beberapa item pengeluaran, diantaranya ;

1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran
2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
4. Kesejahteraan pegawai
5. Administrasi
6. Pembinaan teknis educative
7. Pendataan

B. Pembahasan

1. Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan

Landasan konseptual ekonomi pendidikan menurut Cohn yang dikutip oleh Syaiful Sagala (2010, hal.208) mengacu pada prinsip bahwa

ekonomi adalah keterbatasan atau kelangkaan (*scarcity*) dan keinginan (*desirability*). Ekonomi dapat dipahami sebagai suatu studi bagaimana orang atau masyarakat memilih dalam menggunakan uang dan sumber lain yang sifatnya terbatas atau langka untuk menghasilkan atau mencapai keinginan yang sifatnya tidak terbatas.

Hal-hal prinsip dari pengertian ekonomi menurut Syaiful Sagala ((2010, hal. 209) adalah (1) keterbatasan dan kelangkaan dan (2) yang diinginkan dan dibutuhkan orang. Ekonomi berkepentingan hanya sumber-sumber daya yang tersedia dalam kuantitas terbatas dan yang mencakup praktis tiap barang dan jasa yang terpikirkan, termasuk udara, dan sumber-sumber daya lain yang konon melimpah, yang dalam banyak kasus tidak lagi melimpah dengan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan rakyat. Selanjutnya Cohn mengatakan biaya pendidikan adalah *cost* yang harus dikeluarkan yaitu perhitungan atau biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan terkait dalam pendidikan.

Secara teoritis konsep biaya di bidang lain mempunyai kesamaan dengan bidang pendidikan, dimana lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian dan keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seorang lulusan. Kegiatan pendidikan sebenarnya dipandang sebagai pelayanan (*service*) terhadap siswa atau peserta didik selama belajar. Pendidikan sebagai proses produksi yang menghasilkan lulusan yang berhasil dapat ditentukan oleh jumlah pendaftar dan komponen input dalam suatu sistem pendidikan (Nanang Fattah, 2004, hal.16).

Karena pendidikan merupakan proses produksi yang menghasilkan lulusan yang bermutu sehingga diperlukan pengelolaan pembiayaan agar mutu dari lulusan dapat bersaing di dunia kerja. Untuk itu dalam meningkatkan mutu lulusan diperlukan dukungan yang kuat dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan. Dari sekian banyaknya kriteria untuk meningkatkan mutu lulusan tidak terlepas dari

penggunaan uang dalam terselenggaranya proses pendidikan. Sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang.

2. Pengelolaan Pembiayaan pada Perguruan Tinggi

Pembiayaan menurut Indra Bastian (2006, hal.160) bahwa ditinjau dari sudut *human capital* (modal manusia) sebagai unsur modal pendidikan diperhitungkan sendiri sebagai faktor penentu keberhasilan seseorang, baik secara sosial maupun ekonomi. Nilai pendidikan merupakan asset moral, dimana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pendidikan dianggap sebagai upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan.

Pembiayaan pendidikan pada pendidikan tinggi dapat dibedakan atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal dimaksud di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, meliputi :

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Untuk mendukung terselenggaranya proses pendidikan, diperlukan manajemen dalam pengelolaan biaya pendidikan. Menurut R. Bowen (1970) bahwa biaya diperguruan tinggi , biasanya berupa pembayaran dalam bentuk uang untuk mengoperasikan lembaga tersebut, termasuk adanya biaya upah dan gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, alat peraga bagi mahasiswa, pemeliharaan peralatan dan sebagainya.

Pengaturan biaya pendidikan di perguruan tinggi salah satunya adalah berkaitan dengan insentif dan tingkah laku kelembagaan untuk menghasilkan banyaknya kegiatan dari tahun ke tahun. Menurut R. Bowen (1970) dapat diasumsikan mengenai pengaturan-pengaturan biaya pada Perguruan Tinggi sebagai berikut:

1. Tujuan kelembagaan yang ideal adalah pendidikan yang *excellence prestige* dan bersikap *influence*.
2. Yang dinamakan *excellence prestige dan Influence* adalah tidak adanya batasan terhadap jumlah uang suatu lembaga yang bisa dimanfaatkan bagi lajunya pendidikan
3. Setiap kelembagaan meningkatkan keseluruhan keuangan yang ia dapatkan.
4. Setiap lembaga menghasilkan sumber dana tanpa batas.
5. Secara kumulatif, keempat pengaturan tertuju pada peningkatan biaya pengeluaran.

Pengaturan biaya pendidikan pada perguruan tinggi perlu menyusun Rencana Anggaran Perbelanjaan Biaya Perguruan Tinggi (RAPBPT). Dalam menyusun rencana anggaran perbelanjaan maka harus diketahui lebih dahulu budget yang tersedia. Rencana anggaran tersebut mencakup :

1. Rencana operasional keuangan mencakup estimasi tentang pengeluaran untuk suatu periode/kurun waktu.
2. Rencana sistematis untuk efisiensi pemanfaatan tenaga, industry (sumber) dan Rencana keuangan yang diprioritaskan pada pola pengawasan operasional pada masa datang suatu lembaga.

Aspek fungsional budget menggambarkan kegunaan atau manfaat dari budget adalah :

1. Berpengaruh terhadap motivasi
2. Memungkinkan adanya koordinasi kerja

3. Dapat digunakan untuk kegiatan koreksi/bila terjadi penyimpangan
4. Meningkatkan alokasi sumber;
5. Meningkatkan komunikasi; dan
6. Sebagai alat evaluasi atau pengawasan

Menurut Robert R. Bowen (1970) mengenai gambaran distribusi prosentase dari pengeluaran pada institute pendidikan tinggi.

Distribusi Pengeluaran PT

Klasifikasi Pengeluaran	Gaji	Alat dan Pelayanan
1. Pendidikan	39,80 %	19,10 %
2. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	10,90 % 2,70 %	7,90 % 13,70 %
3. Tenaga Bantuan	4,00 %	2,90 %
4. Layanan Kesehatan		
Total	57,40%	43,60 %

Pengelolaan dana bukan hanya sekedar mengarah pada penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien, tetapi juga dengan dana tersebut perguruan tinggi harus mampu meningkatkan mutu lulusannya dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang lainnya. Dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”

C. Kesimpulan

Pendidikan merupakan bagian dari *public service* atau jasa layanan umum. Penyelenggaraan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan tinggi membutuhkan perhatian karena melalui pendidikan dapat

menghasilkan keahlian dan keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seorang lulusan.

Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari penggunaan dana/biaya. Meliputi pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Karena biaya sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga perguruan tinggi harus menetapkan berapa kisaran dana dari kegiatan pendidikan tersebut yang biasanya dituangkan dengan jelas diawal pada rencana strategis (Resntra) lembaga pendidikan dan setiap perguruan tinggi hendaknya membuat rencana anggaran perbelanjaan perguruan tinggi tersebut sehingga perguruan tinggi dapat menghitung estimasi pengeluaran untuk satu periode/kurun waktu tertentu.

D. Daftar Pustaka

- Barnawi & Muhammad Arifin, 2012, *Buku Pintar Mengelola Sekolah Swasta*, Jakarta, Ar-Ruzz Media
- Howard R. Bowen (1981). *The Cost of Higher Education Edisi kedua*. California USA: The Carnegie Foundation for Advancement of Teaching dan Jossey-Bass Inc.
- Muhaimin dkk, 2009, *Manajemen Pendidikan Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah / Madrasah*, Kencana

Muhammad Fakry Gaffar, 2016, *Materi Ajar mata pelajaran “ Manajemen Pembiyan Pendidikan, Teori dan Praktek*. Unipersitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Nanang Fatah, 2004, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya

Syaiful Sagala (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Surya Darma dan Haedar Akib. 2009, *Kewirausahaan Sekolah Berbasis Kreativitas Dan Inovasi. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.15 Edisi Khusus I.ISSN 0215-2673

Uhar Suharsaputra, 2010, *Administrasi Pendidikan*. Bandung, Refika Aditama